

ISLAMIC EDUCATION REFORM POLITICS IN INDONESIA: A CONCEPTUAL ANALYSIS AND DEVELOPMENT STRATEGIES FROM A LITERATURE REVIEW PERSPECTIVE

Muh. Nur Ichzan¹, Akbar Ista²

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana, Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ((FISIP), Universitas Hasanuddin Makassar

² Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana

Correspondence: muhnurichzan7@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jul 29th, 2026

Revised Aug 14th, 2026

Accepted Aug 18th, 2026

Keyword:

Globalization; Reform Politics;
Islamic Education

ABSTRACT

Islamic education reform politics in Indonesia cannot be separated from the dynamics of national politics, social change, technological development, and the demands of globalization. Changes in political configurations across different historical periods have influenced the direction of policies, institutional orientations, and development strategies for Islamic education. This study aims to conceptually analyze the relationship between reform politics and the development of Islamic education in Indonesia and to formulate development strategies for addressing the challenges of globalization. This research employs a qualitative approach using a literature review design. The research data were obtained through documentary studies of books, scholarly articles, laws and regulations, and other relevant references, which were subsequently analyzed using content analysis. The findings indicate that Islamic education policy has evolved dynamically in response to changes in national political configurations, from the colonial period and independence era to the New Order and Reform Era. Furthermore, from an Islamic perspective, education politics is grounded in five main dimensions: strengthening faith, enhancing piety, cultivating noble character, developing mastery of knowledge, and encouraging righteous deeds. In the era of globalization, Islamic education reform needs to focus on strengthening educational democratization, developing an integrative curriculum, reinforcing character education, enhancing teacher professionalism, and developing adaptive governance of Islamic educational institutions in response to advances in science and technology while preserving their Islamic identity. This study provides a conceptual synthesis of the relationship between reform politics and the development of Islamic education, which is expected to serve as a reference for policy formulation and the development of a higher-quality, adaptive, and sustainable Islamic education system.

© 2026 The Authors. Published by ISTA
is an open access article
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



ACADEMICA INSTITUT. This
under the CC BY license

INTRODUCTION

Pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Sebagai negara yang religius, Indonesia menempatkan nilai-nilai agama sebagai fondasi penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transmisi ilmu pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan karakter bangsa yang mampu memperkuat pencapaian tujuan pendidikan nasional (Astuti & Khoiri, 2023). Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab (Taufiq & Chatib, 2018).

Memasuki era globalisasi dan revolusi teknologi, pendidikan Islam menghadapi dinamika yang semakin kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan digitalisasi telah membawa perubahan yang sangat cepat terhadap tatanan sosial, budaya, maupun cara berpikir masyarakat. Pergeseran nilai dan norma budaya tidak dapat dihindari karena kelompok yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi cenderung mendominasi interaksi budaya global. Perubahan tersebut menjadi tantangan serius bagi pendidikan Islam untuk mampu mempertahankan nilai-nilai keislaman sekaligus beradaptasi terhadap perkembangan zaman melalui kebijakan dan strategi pembaharuan yang relevan (Astuti & Khoiri, 2023). Di sisi lain, pendidikan Islam juga dihadapkan pada berbagai persoalan sosial kontemporer seperti meningkatnya intoleransi berbasis SARA, radikalisme, penyalahgunaan narkoba, dampak negatif media sosial, serta praktik korupsi yang menunjukkan masih lemahnya internalisasi nilai-nilai moral dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya stagnasi dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk pada sektor pendidikan (Harun, 2018).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara cita-cita ideal pendidikan Islam dengan realitas implementasinya. Secara normatif, pendidikan Islam diarahkan untuk membentuk manusia yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Namun dalam praktiknya, sistem pendidikan masih cenderung berorientasi pada pencapaian kemampuan akademik (*hard skill*), sementara penguatan karakter, moral, kepemimpinan, dan keterampilan sosial (*soft skill*) belum memperoleh perhatian yang optimal. Padahal, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga oleh kemampuan mengelola diri, bekerja sama, berkomunikasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral (Harun, 2018). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa arah pengembangan pendidikan Islam masih memerlukan pembaharuan yang mampu menjawab perubahan sosial, politik, dan perkembangan teknologi secara berkelanjutan.

Dalam perspektif politik pendidikan, pembaharuan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari kebijakan negara, dinamika sosial, maupun arah pembangunan nasional. Politik pendidikan berperan menentukan orientasi, regulasi, tata kelola, kurikulum, hingga strategi pengembangan lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, pembaharuan pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan perubahan kurikulum atau metode pembelajaran, tetapi juga mencakup transformasi kebijakan yang mampu memperkuat fungsi pendidikan Islam sebagai agen perubahan sosial dan pembangunan bangsa. Berangkat dari kondisi tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana politik pembaharuan mampu mengarahkan pengembangan pendidikan Islam agar tetap relevan terhadap dinamika global tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pendidikan Islam dari aspek pembentukan karakter, modernisasi pendidikan, maupun tantangan global (Harun, 2018; (Astuti & Khoiri, 2023), sebagian besar penelitian tersebut masih membahas isu-isu tersebut secara terpisah. Kajian terdahulu lebih banyak menyoroti dimensi filosofis, pedagogis, atau implementasi pendidikan Islam, sementara pembahasan mengenai politik pembaharuan sebagai kerangka yang memengaruhi arah pengembangan pendidikan Islam masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan dinamika kebijakan pendidikan, perubahan sosial akibat revolusi teknologi, penguatan karakter, serta pengembangan kompetensi abad ke-21 dalam perspektif politik pendidikan Islam melalui pendekatan kajian literatur juga masih belum banyak ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang memerlukan kajian lebih komprehensif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa sintesis konseptual mengenai politik pembaharuan dan pengembangan pendidikan Islam melalui pendekatan kajian literatur yang mengintegrasikan berbagai perspektif mengenai kebijakan pendidikan, modernisasi pendidikan Islam, penguatan karakter, pengembangan *hard skill* dan *soft skill*, serta respons pendidikan Islam terhadap tantangan revolusi teknologi dan perubahan sosial. Integrasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kerangka konseptual yang lebih utuh mengenai arah pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia.

Penelitian ini menjadi penting karena hasil kajian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya khazanah ilmu politik pendidikan Islam, sekaligus memberikan rekomendasi konseptual bagi pemerintah, akademisi, pengelola lembaga pendidikan Islam, dan para pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pengembangan pendidikan Islam yang adaptif, berorientasi pada pembentukan karakter, serta tetap berpijak pada nilai-nilai Islam di tengah dinamika

global. Dengan demikian, politik pembaharuan tidak hanya dipahami sebagai proses perubahan kebijakan, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi pendidikan Islam dalam menjawab tantangan masa depan.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan menganalisis, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan politik pembaharuan dan pengembangan pendidikan Islam. Kajian literatur dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan politik pendidikan Islam, dimensi pendidikan menurut perspektif Islam, serta strategi pengembangan pendidikan Islam dalam menghadapi dinamika globalisasi. Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi ilmiah, meliputi artikel jurnal terakreditasi, buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur utama yang menjadi dasar analisis antara lain karya Sirozi (2013) mengenai politik pendidikan, Harun (2018) tentang politik pendidikan Islam dan problematika identitas Muslim, Astuti & Khoiri (2023) mengenai kebijakan politik pendidikan Islam di Indonesia, Rajab (2022) tentang demokratisasi, Suryadi (2015) mengenai dimensi pendidikan Islam, Tambun et al (2020) mengenai Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai referensi pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca secara kritis, dan menyeleksi berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari sumber akademik yang kredibel dan memiliki keterkaitan langsung dengan politik pembaharuan, kebijakan pendidikan Islam, serta pengembangan pendidikan Islam pada era globalisasi.

RESULTS AND DISCUSSION

Politik Pendidikan Islam dan Periodisasi Kesejarahan Perjalanan Bangsa

Politik pendidikan merupakan bidang kajian yang bersifat interdisipliner (*interdisciplinary study*) karena mengintegrasikan perspektif ilmu politik dan ilmu pendidikan untuk memahami hubungan timbal balik antara dinamika kebijakan politik dengan penyelenggaraan pendidikan (Sirozi, 2013). Dalam konteks pendidikan Islam, politik pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kebijakan pemerintah yang mengatur sistem pendidikan, tetapi juga sebagai proses yang memengaruhi arah, orientasi, serta pengembangan lembaga pendidikan Islam, termasuk pondok pesantren dan madrasah. Politik pendidikan menentukan bagaimana tujuan pendidikan dirumuskan, siapa aktor yang terlibat dalam proses perumusannya, mekanisme pengambilan keputusan yang digunakan, hingga kepentingan politik maupun kepentingan pendidikan yang diakomodasi dalam setiap kebijakan (Harun, 2018). Dengan demikian, kajian politik pendidikan Islam tidak cukup hanya mengkaji substansi kurikulum atau nilai-nilai pendidikan Islam semata, tetapi juga harus melihat dimensi historis, sosial, dan politik yang melatarbelakangi lahirnya berbagai kebijakan pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Harun (2018), politik pendidikan bertujuan menjelaskan hubungan antara proses perumusan tujuan pendidikan (*the production of goals*) dengan strategi pencapaiannya (*the form of their achievements*). Oleh karena itu, arah pembaharuan pendidikan Islam selalu dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan, ideologi negara, serta kepentingan para pemangku kebijakan pada setiap periode pemerintahan.

Berdasarkan hasil kajian literatur, perkembangan politik pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah bangsa. Setiap fase pemerintahan memiliki karakteristik politik yang berbeda sehingga melahirkan orientasi kebijakan pendidikan Islam yang juga berbeda. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam senantiasa mengalami proses adaptasi terhadap dinamika politik nasional tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pembentukan karakter bangsa. Indonesia mengalami beberapa fase kesejarahan bangsa yaitu;

1. Fase Pra-kemerdekaan (Kolonialisme/Penjajahan)

Pada fase pra-kemerdekaan (masa kolonial), pendidikan Islam memiliki fungsi yang jauh melampaui aktivitas pembelajaran keagamaan. Lembaga pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren, berkembang sebagai pusat pembinaan masyarakat sekaligus menjadi basis perjuangan melawan kolonialisme. Harun (2018) menjelaskan bahwa lembaga pendidikan pada masa penjajahan menjadi ruang konsolidasi kelompok-kelompok terdidik dalam menyusun strategi perjuangan menuju kemerdekaan. Senada dengan itu, Mas'ud (2013) menegaskan bahwa pesantren sebagai sistem

pendidikan Islam tertua di Indonesia memiliki kontribusi besar dalam membangun semangat nasionalisme dan mempertahankan identitas keislaman masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa sejak awal keberadaannya, pendidikan Islam tidak pernah terlepas dari dinamika politik bangsa, bahkan menjadi bagian penting dalam proses pembentukan kesadaran kebangsaan.

2. Fase Kemerdekaan (Orde Lama)

Memasuki fase kemerdekaan atau Orde Lama, arah politik pendidikan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Meskipun Indonesia telah memperoleh kemerdekaan, perdebatan mengenai dasar negara antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam masih sangat kuat. Perdebatan tersebut akhirnya melahirkan kompromi politik dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dampak dari kompromi tersebut tercermin dalam sistem pendidikan nasional, yaitu dengan dibentuknya dualisme pengelolaan pendidikan melalui Kementerian Pendidikan yang mengelola pendidikan umum dan Kementerian Agama yang mengelola pendidikan agama serta lembaga pendidikan keagamaan (Harun, 2018). Dari perspektif politik pendidikan, kebijakan ini menunjukkan adanya upaya negara mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok politik sekaligus menjaga stabilitas nasional. Namun, di sisi lain dualisme kelembagaan tersebut juga menciptakan perbedaan orientasi kebijakan yang dalam perkembangannya memengaruhi kualitas, tata kelola, dan distribusi sumber daya pendidikan.

3. Fase Orde Baru

Pada masa Orde Baru, pemerintah tetap mempertahankan model pendidikan yang bersifat akomodatif terhadap dua sistem pendidikan tersebut. Akan tetapi, orientasi pembangunan nasional yang lebih menekankan modernisasi menyebabkan perhatian pemerintah lebih banyak diarahkan kepada pendidikan umum dibandingkan pendidikan Islam. Harun (2018) menjelaskan bahwa sebagian besar lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren dan madrasah, berkembang secara mandiri melalui dukungan masyarakat dibandingkan melalui intervensi pemerintah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberlangsungan pendidikan Islam lebih banyak ditopang oleh partisipasi sosial daripada kebijakan negara. Selain itu, Sirozi (2013) mengemukakan bahwa keterbatasan pengaruh politisi Muslim di parlemen pada masa Orde Baru menyebabkan aspirasi pengembangan pendidikan Islam belum memperoleh ruang yang memadai dalam proses perumusan kebijakan nasional. Akibatnya, berbagai kebijakan pendidikan pada masa tersebut lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik dibandingkan penguatan kelembagaan pendidikan Islam.

4. Fase Demokrasi Liberal

Reformasi politik yang melahirkan era demokrasi liberal membawa perubahan besar terhadap hubungan negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Sistem demokrasi memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan, sementara pemerintah lebih berperan sebagai regulator, fasilitator, dan mediator. Salah satu implikasi penting dari perubahan tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Regulasi tersebut memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap eksistensi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Meskipun demikian, hasil kajian Harun (2018) menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut juga memunculkan berbagai perdebatan. Secara historis, lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren telah eksis jauh sebelum negara Indonesia berdiri sehingga memiliki karakteristik pengelolaan yang mandiri dan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, muncul kekhawatiran bahwa meningkatnya intervensi pemerintah melalui regulasi dapat mengurangi otonomi pesantren dalam menentukan kurikulum dan sistem pendidikannya. Selain itu, kebijakan tersebut juga berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen politik oleh pemerintah daerah, khususnya dalam memperoleh legitimasi politik melalui dukungan kelompok-kelompok keagamaan (Harun, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan pendidikan Islam selalu berada dalam ruang dialektika antara kebutuhan standarisasi nasional dengan upaya mempertahankan kemandirian lembaga pendidikan Islam.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa politik pendidikan Islam di Indonesia mengalami transformasi mengikuti dinamika politik nasional. Pada masa kolonial, pendidikan Islam berfungsi sebagai instrumen perjuangan; pada masa kemerdekaan menjadi media kompromi politik; pada masa Orde Baru berkembang secara mandiri di tengah dominasi kebijakan pendidikan umum; sedangkan pada era reformasi memperoleh legitimasi yang lebih kuat melalui regulasi negara, meskipun

tetap menghadapi tantangan terkait otonomi kelembagaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa politik pembaharuan pendidikan Islam tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh konfigurasi kekuasaan, ideologi negara, serta dinamika hubungan antara negara dan masyarakat.

Hasil kajian ini sekaligus menguatkan pandangan bahwa pengembangan pendidikan Islam pada masa mendatang memerlukan paradigma politik pendidikan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Politik pendidikan tidak seharusnya hanya berorientasi pada aspek administratif dan regulatif, tetapi juga diarahkan pada penguatan kualitas kelembagaan, peningkatan mutu sumber daya manusia, inovasi kurikulum, serta pemberian ruang yang lebih luas bagi pesantren dan madrasah untuk mengembangkan model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan karakteristik keislamannya. Dengan demikian, politik pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, dan tetap berakar pada nilai-nilai Islam sekaligus responsif terhadap tantangan global.

Dimensi Politik Pendidikan Menurut Pandangan Islam

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa politik pendidikan dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai kebijakan negara yang mengatur sistem pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) melalui proses pembentukan manusia seutuhnya. Politik pendidikan Islam memiliki orientasi yang lebih luas dibandingkan paradigma pendidikan modern karena tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, kelembagaan, maupun pengembangan kompetensi akademik, tetapi juga diarahkan pada pembentukan keimanan, ketakwaan, akhlak, penguasaan ilmu pengetahuan, dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Kholik, 2025). Dengan demikian, keberhasilan politik pendidikan Islam tidak hanya diukur dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia secara intelektual, tetapi juga dari terbentuknya karakter dan moral peserta didik yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Harun (2018), politik pendidikan nasional dalam pandangan Islam setidaknya memiliki lima dimensi utama, yaitu membangun iman, meningkatkan ketakwaan, membentuk akhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan, dan mendorong amal saleh. Kelima dimensi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Membangun Iman

Dalam perspektif Islam, tujuan utama pendidikan adalah menanamkan keimanan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai fondasi seluruh aktivitas kehidupan manusia. Keimanan tidak hanya dipahami sebagai pengakuan secara lisan, tetapi diwujudkan dalam keyakinan yang kokoh, sikap hidup, serta kesediaan berjuang di jalan Allah (Johannes et al., 2024). Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Hujurat ayat 15, yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam harus diarahkan pada penguatan akidah sehingga mampu membentuk pribadi yang memiliki keyakinan kokoh dan konsisten dalam menjalankan ajaran agama. Dalam konteks politik pendidikan, pembangunan iman menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan kompetensi akademik, tetapi juga pada penguatan spiritualitas peserta didik sebagai fondasi pembangunan karakter bangsa (Harun, 2018).

2. Meningkatkan Ketakwaan

Pendidikan Islam tidak berhenti pada aspek keimanan, tetapi juga bertujuan membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. Ketakwaan merupakan implementasi nyata dari keimanan

melalui ketaatan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya (Az-Zuhdy & Husni, 2025). Allah SWT menegaskan hal tersebut dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017).

Ayat tersebut menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia bukan terletak pada status sosial, kekuasaan, maupun asal-usulnya, melainkan pada tingkat ketakwaannya. Oleh karena itu, politik pendidikan Islam perlu diarahkan pada pembentukan lingkungan pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai religius, toleransi, tanggung jawab, dan kesadaran moral sehingga menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas spiritual yang tinggi

3. Berakhlak Mulia

Menurut Harun (2018), salah satu tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang memiliki budi pekerti luhur. Dalam perspektif Islam, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur melalui capaian akademik, tetapi juga melalui kualitas perilaku peserta didik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Akhlak menjadi manifestasi dari keimanan dan ketakwaan yang telah tertanam dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, politik pendidikan Islam harus memberikan ruang yang proporsional bagi pendidikan karakter melalui integrasi nilai-nilai moral ke dalam kurikulum, budaya sekolah, maupun proses pembelajaran (Rahmi et al., 2025). Pendekatan tersebut menjadi semakin relevan di tengah berbagai persoalan sosial kontemporer seperti degradasi moral, intoleransi, penyalahgunaan media sosial, dan praktik korupsi yang menunjukkan pentingnya revitalisasi pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam.

4. Menguasai Ilmu

Islam menempatkan ilmu sebagai salah satu instrumen utama dalam membangun peradaban (Madania et al., 2026). Pendidikan Islam tidak hanya mendorong penguasaan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam Q.S. Al-Mujadilah ayat 11, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan yang tinggi kepada orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, politik pendidikan Islam harus mampu mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, riset, serta penguasaan teknologi tanpa melepaskan nilai-nilai etik dan spiritual. Dalam era globalisasi dan revolusi digital, dimensi ini menjadi semakin penting karena pendidikan Islam dituntut mampu menghasilkan generasi yang kompetitif, adaptif, sekaligus memiliki tanggung jawab moral dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan bagi kemaslahatan masyarakat.

5. Beramal Saleh

Pendidikan Islam pada akhirnya diarahkan agar ilmu, keimanan, dan ketakwaan yang dimiliki seseorang diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi sesama. Menurut Suryadi (2015), pendidikan Islam harus mendorong peserta didik untuk senantiasa melakukan amal saleh sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai keislaman. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Q.S. Al-'Ashr ayat 2–3:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017).

Ayat tersebut menegaskan bahwa keberhasilan manusia ditentukan oleh perpaduan antara keimanan, amal saleh, komitmen terhadap kebenaran, dan kesabaran. Oleh karena itu, politik pendidikan Islam harus menghasilkan kebijakan yang tidak hanya melahirkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, semangat pengabdian, dan tanggung jawab terhadap pembangunan masyarakat. Pendidikan Islam tidak boleh berhenti pada proses transfer pengetahuan, melainkan harus mampu melahirkan transformasi sosial melalui praktik-praktik kebaikan yang memberikan manfaat bagi kehidupan bersama.

Berdasarkan hasil kajian literatur tersebut, dapat dipahami bahwa kelima dimensi politik pendidikan menurut pandangan Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Membangun iman menjadi fondasi spiritual, ketakwaan menjadi orientasi moral, akhlak mulia menjadi manifestasi perilaku, penguasaan ilmu menjadi instrumen kemajuan peradaban, sedangkan amal saleh menjadi implementasi nyata dari seluruh proses pendidikan. Dengan demikian, politik pembaharuan dan pengembangan pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada penyusunan kebijakan pendidikan yang mampu mengintegrasikan dimensi spiritual, intelektual, moral, dan sosial secara seimbang. Integrasi tersebut menjadi penting agar pendidikan Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan global, sekaligus mampu mempertahankan identitas dan nilai-nilai dasar ajaran Islam sebagai landasan pembangunan manusia yang berakarakter, berilmu, dan berdaya saing.

Strategi Pendidikan Islam dalam Menghadapi Politik Pembaharuan di Era Globalisasi

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa politik pembaharuan pendidikan Islam pada era globalisasi tidak dapat dipisahkan dari perubahan paradigma tata kelola pendidikan yang semakin menekankan prinsip demokratisasi, otonomi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi telah mengubah pola hubungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat sehingga menuntut sistem pendidikan Islam untuk melakukan pembaharuan tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental ajaran Islam. Dalam konteks ini, politik pendidikan tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam merumuskan arah pengembangan pendidikan Islam yang responsif terhadap dinamika global. Salah satu isu penting dalam politik pembaharuan pendidikan Islam adalah demokratisasi pendidikan. Rajab (2022) menjelaskan bahwa tuntutan demokratisasi pada awalnya muncul sebagai respons terhadap sistem politik yang bersifat otoriter. Seiring dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, semangat demokratisasi tidak hanya memengaruhi sistem politik, tetapi juga merambah berbagai sektor pembangunan, termasuk bidang pendidikan. Demokratisasi pendidikan menempatkan setiap individu sebagai subjek yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan tidak lagi berorientasi pada pendekatan yang bersifat sentralistik dan seragam, tetapi lebih menekankan partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Tambun et al (2020) yang menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sekaligus memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas. Dalam perspektif pendidikan Islam, demokratisasi tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai upaya memberikan ruang yang lebih luas bagi lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan inovasi pembelajaran, tata kelola kelembagaan, serta kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, Astuti & Khoiri (2023) menegaskan bahwa

demokratisasi pendidikan Islam menuntut perubahan dari sistem pendidikan yang sentralistik, seragam, dan dependen menuju sistem yang lebih otonom, beragam, inovatif, dan independen. Transformasi tersebut menjadi bagian penting dari politik pembaharuan pendidikan Islam agar mampu meningkatkan daya saing lembaga pendidikan di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks.

Selain demokratisasi, globalisasi merupakan faktor utama yang mendorong lahirnya berbagai strategi pembaharuan pendidikan Islam. Globalisasi merupakan konsekuensi dari modernisasi yang membawa perubahan cepat dalam bidang teknologi informasi, komunikasi, ekonomi, maupun budaya. Perubahan tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan (Andu, 2026). Dalam perspektif pendidikan Islam, globalisasi tidak semestinya dipandang sebagai ancaman yang harus ditolak maupun sebagai fenomena yang diterima tanpa seleksi. Sebaliknya, globalisasi harus dipahami sebagai realitas yang mendorong pendidikan Islam untuk terus melakukan inovasi, meningkatkan kualitas, dan memperkuat identitasnya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sejalan dengan pandangan tersebut, Aulia et al (2025) mengemukakan bahwa dunia pendidikan saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain globalisasi, kompleksitas, *turbulence*, dinamika, akselerasi perubahan, keberlanjutan dari sistem tradisional menuju sistem modern, konektivitas, konvergensi, konsolidasi, rasionalisme, paradoks global, serta semakin besarnya pengaruh kekuatan pemikiran dalam membentuk kehidupan masyarakat. Beragam tantangan tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tidak lagi dapat mengandalkan pola pengelolaan konvensional, tetapi harus mampu mengembangkan sistem pendidikan yang fleksibel, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Dalam konteks tersebut, pendidikan Islam dituntut untuk mengambil posisi yang proporsional terhadap arus globalisasi. Pendidikan Islam tidak boleh bersikap antiglobalisasi karena sikap tersebut berpotensi menyebabkan stagnasi intelektual (*intellectual shut down*) yang menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Sebaliknya, pendidikan Islam juga tidak boleh larut sepenuhnya dalam arus globalisasi hingga kehilangan identitas keislamannya. Posisi yang ideal adalah menjadikan globalisasi sebagai dinamisor yang mendorong peningkatan mutu pendidikan, sekaligus menjadikan nilai-nilai Islam sebagai filter dalam menyaring berbagai pengaruh eksternal. Dengan demikian, politik pembaharuan pendidikan Islam harus mampu menciptakan keseimbangan antara keterbukaan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dengan penguatan identitas keislaman sebagai fondasi utama penyelenggaraan pendidikan.

Hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa salah satu tantangan mendasar pendidikan Islam pada era globalisasi adalah kecenderungan proses pembelajaran yang masih berorientasi pada penguasaan aspek kognitif (*hard skills*) dibandingkan pembentukan karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Orientasi pendidikan yang terlalu menitikberatkan pada pencapaian akademik menyebabkan internalisasi nilai-nilai Islam belum berlangsung secara optimal dalam kehidupan peserta didik. Akibatnya, berbagai fenomena degradasi moral masih sering ditemukan, seperti meningkatnya pergaulan bebas akibat pengaruh budaya Barat, penyalahgunaan media sosial, menurunnya etika peserta didik terhadap guru, hingga munculnya praktik-praktik yang mencederai integritas dunia pendidikan, termasuk hubungan yang tidak profesional antara pendidik dan peserta didik maupun berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur melalui prestasi akademik semata, tetapi juga melalui kemampuan lembaga pendidikan dalam membentuk karakter dan akhlak peserta didik.

Selain itu, hubungan antara pendidik dan peserta didik juga menghadapi tantangan baru sebagai dampak perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurunnya penghormatan terhadap guru, bergesernya nilai-nilai keteladanan, hingga kesenjangan ekonomi antara pendidik dan orang tua peserta didik berpotensi memengaruhi kualitas interaksi dalam proses pembelajaran. Padahal, dalam tradisi pendidikan Islam, hubungan guru dan murid dibangun atas dasar penghormatan, keteladanan, serta tanggung jawab moral dalam proses transfer ilmu dan pembentukan kepribadian. Oleh karena itu, politik pembaharuan pendidikan Islam perlu diarahkan pada penguatan budaya akademik yang menjunjung tinggi etika, integritas, dan nilai-nilai adab sebagai karakter utama lembaga pendidikan Islam.

Berdasarkan hasil kajian literatur tersebut, strategi pendidikan Islam dalam menghadapi politik pembaharuan di era globalisasi harus dilakukan secara komprehensif melalui beberapa langkah strategis. Pertama, memperkuat demokratisasi pendidikan dengan memberikan ruang inovasi bagi lembaga pendidikan Islam tanpa menghilangkan fungsi negara sebagai regulator. Kedua, melakukan

pembaharuan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai Islam secara seimbang. Ketiga, memperkuat pendidikan karakter melalui internalisasi nilai keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan tanggung jawab sosial dalam seluruh proses pembelajaran. Keempat, meningkatkan profesionalisme pendidik agar mampu menjadi teladan sekaligus fasilitator pembelajaran pada era digital. Kelima, membangun tata kelola lembaga pendidikan Islam yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil kajian ini menegaskan bahwa politik pembaharuan pendidikan Islam pada era globalisasi bukan sekadar proses perubahan kebijakan administratif, melainkan transformasi menyeluruh terhadap paradigma penyelenggaraan pendidikan Islam. Pembaharuan tersebut harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tuntutan perkembangan global sehingga pendidikan Islam tetap mempertahankan identitasnya sebagai lembaga pembentukan karakter dan moral, sekaligus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, inovatif, dan berdaya saing dalam masyarakat global.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa politik pembaharuan memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Perjalanan politik pendidikan Islam menunjukkan bahwa setiap periode sejarah bangsa melahirkan orientasi kebijakan yang berbeda sesuai dengan konfigurasi politik, ideologi negara, dan dinamika sosial yang berkembang. Mulai dari masa kolonial, kemerdekaan, Orde Baru, hingga era reformasi, pendidikan Islam senantiasa mengalami proses adaptasi terhadap perubahan politik tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai lembaga pembentukan karakter, pengembangan ilmu pengetahuan, dan penguatan nilai-nilai keislaman. Kajian ini juga menunjukkan bahwa politik pendidikan Islam dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada aspek regulasi dan tata kelola kelembagaan, tetapi memiliki dimensi yang lebih komprehensif, yaitu membangun keimanan, meningkatkan ketakwaan, membentuk akhlak mulia, mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan, serta mendorong terwujudnya amal saleh. Kelima dimensi tersebut menjadi landasan filosofis yang harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan praktik penyelenggaraan pendidikan Islam agar mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul secara intelektual, spiritual, dan sosial.

Di sisi lain, era globalisasi menghadirkan tantangan baru berupa demokratisasi pendidikan, perkembangan teknologi informasi, perubahan sosial-budaya, serta degradasi moral yang menuntut pendidikan Islam melakukan pembaharuan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, politik pembaharuan pendidikan Islam harus diarahkan pada penguatan demokratisasi pendidikan, pembaharuan kurikulum yang integratif, penguatan pendidikan karakter, peningkatan profesionalisme pendidik, serta pengembangan tata kelola lembaga pendidikan Islam yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Pembaharuan tersebut harus mampu mengintegrasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam sehingga pendidikan Islam tidak terjebak pada sikap resistif terhadap globalisasi maupun kehilangan identitas keislamannya.

Kajian ini memberikan kontribusi konseptual berupa sintesis mengenai hubungan antara politik pembaharuan, dimensi pendidikan Islam, dan strategi pengembangan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan global. Sintesis tersebut menegaskan bahwa keberhasilan politik pembaharuan pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh perubahan kebijakan administratif, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk menguji implementasi politik pembaharuan pendidikan Islam pada berbagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia sehingga diperoleh model kebijakan yang lebih aplikatif dan kontekstual dalam menjawab tantangan pendidikan pada era globalisasi.

REFERENCES

- Abdullah Hilmi Az-Zuhdy, & Muhammad Husni. (2025). Menggali Nilai-Nilai Ketakwaan Dalam Kitab Aqidah Al-Awam. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(1), 460–469. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i1.867>
- Andu, W. S. (2026). PENDIDIKAN ISLAM DAN TANTANGAN GLOBALISASI. *Jurnal Ilmiah*

Manajemen Pendidikan Islam, 1(1), 1–12.

- Astuti, R. S., & Khoiri, Q. (2023). Tantangan Lokal Dan Global Kebijakan Politik Pendidikan Islam Di Indonesia. *Journal on Education*, 5(2), 4570–4581.
- Aulia, A., Ramadhan, A. F., Rahmawati, A., & Kholifah, A. (2025). Pendidikan Global Dan Tantangannya Di Era Modern. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER: Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6), 383–393. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1667>
- Ihsan Harun. (2018). Pondok Pesantren Modern: Politik Pendidikan Islam Dan Problematika Identitas Muslim. *Jurnal As-Salam*, 2(1), 53–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.37249/as-salam.v2i1.9>
- Johannes, N. Y., Rahanra, I. Y., Latuserimala, G., Tuhumury, J., Sairdola, L., Poceratu, I. C., Souisa, S. L., Salhuteru, A. I., Saefatu, M., & Matatula, G. (2024). *Iman yang Amin*. Tohar Media.
- Kholik, M. (2025). *Politik Pendidikan Islam*. AE Publishing.
- Madania, A., Kirana, A., Ramdahani, M. A. F., Naffakhi, A., & Fadhil, A. (2026). Arsitektur Ilmu Dalam Peradaban Islam: Ketika Wahyu, Akal, Dan Budaya Berkolaborasi. *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 505–519.
- Mas'ud, A. R. (2013). Politics of the Nation and Madrasah's Policy. *Edukasi*, 11(3), 294614.
- Rahmi, C. A., Afifah, N., Lestari, D., Kurniawan, D., & Juliani. (2025). Kebijakan Pendidikan Islam dalam Perspektif Politik Pendidikan. *Saramase: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 29–37.
- Rajab, B. (2022). Otoritarianisme-birokratik orde baru, krisis ekonomi dan politik, dan demokrasi formal masa reformasi. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8(1), 59–78. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.21817>
- Sirozi, M. (2013). Konteks dan Kerangka Konseptual Kajian Politik Pendidikan. *Palembang: Neor Fikri*.
- Suryadi, R. A. (2015). *Dimensi-Dimensi Manusia: Perspektif Pendidikan Islam*. Deepublish.
- Tambun, S. I. E., Sirait, G., & Simamora, J. (2020). ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL MENCAKUP BAB IV PASAL 5 MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA DAN PEMERINTAH. *Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora (VISH)*, 01(01), 265. <https://doi.org/https://doi.org/10.51622/vsh.v1i1.27>
- Taufiq, M., & Chatib, M. (2018). PENTINGNYA IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN LITERASI SAINS UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMP DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH “COKROKERTOPATI” KABUPATEN MAGETAN. *UNUSA*, 2(1), 107–113.